

BAB II

POLITIK PRAGMATISME JOKO WIDODO

2.1 Profil Joko Widodo

Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, merupakan Presiden Republik Indonesia ketujuh yang menjabat sejak tahun 2014. Ia lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada tanggal 21 Juni 1961. Sebelum terjun ke politik nasional, Jokowi dikenal sebagai pengusaha mebel yang kemudian memulai karier politik sebagai Wali Kota Surakarta pada periode 2005 hingga 2012, kemudian menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 2012 hingga 2014, dan akhirnya terpilih sebagai Presiden melalui pemilu langsung. Perjalanan politiknya mencerminkan karakter seorang pemimpin populis yang berasal dari luar lingkaran elit tradisional politik Indonesia (Aspinall dan Mietzner, 2019). Citra kesederhanaan serta pendekatan komunikasi langsung kepada rakyat melalui praktik blusukan menjadi ciri khas Jokowi yang membedakannya dari tokoh politik lain pada masanya.

Karier politik Jokowi dimulai ketika ia terpilih sebagai Wali Kota Surakarta pada tahun 2005. Kepemimpinannya menarik perhatian publik karena gaya kepemimpinan yang inklusif, inovatif, dan terbuka. Ia mendorong revitalisasi ruang publik, reformasi birokrasi, serta memperluas dialog dengan masyarakat melalui pelibatan komunitas seni dan budaya dalam pembangunan kota. Berbagai penghargaan tingkat nasional dan internasional ia peroleh selama menjabat sebagai wali kota, dan hal tersebut memperkuat citranya sebagai figur baru dengan gaya kepemimpinan progresif dan bersih (Mietzner, 2015). Keberhasilan tersebut kemudian mengantarkannya ke kursi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 bersama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memperluas praktik kepemimpinan populis yang sebelumnya ia terapkan di Surakarta. Ia mempertahankan gaya blusukan, yaitu kunjungan langsung ke masyarakat untuk mengamati kondisi lapangan dan

menyerap aspirasi tanpa perantara. Strategi ini mendapat respons positif dari media dan masyarakat karena dipandang sebagai pendekatan kepemimpinan yang menunjukkan keterlibatan langsung dalam penyelesaian masalah. Meskipun masa jabatannya tidak berlangsung penuh, popularitasnya meningkat secara nasional. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemudian mencalonkannya sebagai presiden pada Pemilu 2014, menjadikannya calon presiden pertama yang tidak berasal dari kalangan elite politik maupun militer sejak era Reformasi.

2.2 Dinamika Politik Indonesia pada Era Kepemimpinan Jokowi

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk, para founding fathers menetapkan demokrasi sebagai sistem politik yang dianggap paling ideal bagi negara ini. Secara harfiah, demokrasi merupakan sistem pemerintahan oleh rakyat yang menjadi definisi mendasar dan digunakan secara luas (Lijphart, 1984). Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era Reformasi yang ditandai oleh liberalisasi politik, desentralisasi kekuasaan, dan transisi menuju demokrasi multipartai. Perubahan signifikan terjadi melalui pembatasan masa jabatan presiden, pelaksanaan pemilihan umum yang lebih demokratis, serta penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Meskipun demikian, transisi ini tidak secara langsung menyelesaikan tantangan konsolidasi demokrasi dan pembangunan institusi negara.

Sebelum Jokowi menjabat sebagai Presiden, Indonesia berada dalam masa konsolidasi demokrasi selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang ditandai oleh stabilitas politik yang relatif terjaga, namun disertai dengan kuatnya dominasi oligarki dan stagnasi reformasi birokrasi (Tomsa, 2013; Aspinall, 2010). Kompleksitas sistem multipartai dan lemahnya kohesi politik menghasilkan pola pemerintahan yang bertumpu pada kompromi elite, bukan pada kekuatan ideologis atau agenda reformasi yang substantif.

Secara struktural, sistem politik Indonesia pascareformasi telah mengalami demokratisasi melalui pemilu yang semakin terbuka dan institusi politik yang lebih mapan. Akan tetapi, praktik politik yang berlangsung masih sering terjebak dalam patronase, dominasi oligarki, dan pengaruh elite. Dalam konteks tersebut, Jokowi

mewarisi sistem politik yang secara formal demokratis tetapi masih dipengaruhi oleh kekuatan informal, kepentingan partai, serta peran besar oligarki ekonomi. Untuk mempertahankan stabilitas dan efektivitas pemerintahannya, Jokowi perlu menerapkan strategi politik yang adaptif dan fleksibel, sebuah kecenderungan yang mencerminkan karakter pragmatisme politik.

Kepemimpinan Joko Widodo muncul pada lanskap politik Indonesia yang berada dalam masa transisi penting pascareformasi. Ketika pertama kali terpilih sebagai Presiden pada tahun 2014, Jokowi hadir sebagai figur politik yang tidak berasal dari tradisi politik militer maupun kelompok elite lama. Latar belakangnya sebagai pengusaha dan kepala daerah menjadikan Jokowi simbol harapan akan perubahan, kesederhanaan, serta kedekatan dengan rakyat, terutama setelah pemerintahan sebelumnya dinilai terlalu birokratis dan elitis.

2.2.1 Dinamika Politik Indonesia pada Periode Pertama Jokowi

Periode pertama pemerintahan Jokowi (2014–2019) diwarnai oleh kondisi politik yang cenderung terpolarisasi. Ia menghadapi parlemen yang mayoritas dikuasai oleh koalisi oposisi, sehingga kebijakan pemerintahan pada awal masa jabatan kerap terganjal dinamika politik legislatif. Saat awal pemerintahannya, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai pendukung Jokowi hanya menguasai sekitar 37% kursi DPR, kalah dari Koalisi Merah Putih (KMP) bentukan Prabowo Subianto yang menguasai mayoritas kursi DPR dan mendominasi alat kelengkapan dewan (Tempo.co, 2014).

Pasca Pemilu 2014, peta kekuatan politik Indonesia mengalami transformasi signifikan yang mencerminkan dinamika demokrasi, konsolidasi kekuasaan, serta tantangan terhadap institusi politik dan nilai-nilai demokratis. Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden dari latar belakang non-elite politik menandai harapan akan perubahan dan pembaruan dalam sistem politik Indonesia. Namun, perjalanan politik pasca-2014 menunjukkan kompleksitas yang lebih dalam.

Konflik terbuka pun terjadi pada awal pemerintahan, termasuk perebutan kursi Ketua DPR yang akhirnya dimenangkan oleh kader Partai Golkar dari kubu KMP, Setya Novanto. Situasi ini memaksa Jokowi melakukan manuver politik guna memperkuat posisinya, salah satunya dengan merekrut partai-partai oposisi ke dalam

pemerintahan, seperti Partai Golkar dan PAN. Dalam waktu dua tahun, koalisi pemerintahan Jokowi secara *de facto* menguasai lebih dari dua pertiga kursi di DPR, mengubah peta politik menjadi lebih pragmatis dan cair. Ini menunjukkan bagaimana sistem multipartai di Indonesia sangat rentan terhadap pergeseran orientasi partai politik, yang lebih berorientasi pada kekuasaan ketimbang ideologi (Mietzner, 2015).

Meski menguat di legislatif, Jokowi tetap menghadapi tantangan dalam membangun citra sebagai presiden independen. Penunjukan tokoh-tokoh partai ke dalam kabinet, serta intervensi Megawati Soekarnoputri dalam beberapa keputusan politik strategis, mengindikasikan keterbatasan ruang gerak Jokowi sebagai kepala negara. Krisis antara Polri dan KPK awal 2015 terkait kasus Budi Gunawan yang saat ini dicalonkan sebagai Kapolri juga memperjelas ketegangan antara idealisme reformasi dengan kompromi politik yang harus diambil oleh Jokowi demi menjaga stabilitas pemerintahan (The Jakarta Post, 2015).

Selain terjadi pada elit politik, dinamika juga terjadi di lapisan masyarakat khususnya antara kelompok pendukung pemerintah dan oposisi. Terjadi pembelahan sosial yang cukup tajam sehingga menyebabkan polarisasi. Masyarakat mulai terbelah ke dalam dua kutub besar, pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Pilpres 2014 menjadi titik awal polarisasi, ketika Jokowi, yang dianggap mewakili "rakyat kecil" dan perubahan, berhadapan dengan Prabowo, seorang mantan jenderal dengan latar belakang militer dan kedekatan dengan elite Orde Baru. Kontestasi antara keduanya membentuk narasi yang sangat berlawanan: Jokowi disimbolkan sebagai figur reformis, antikorupsi, dan dekat dengan rakyat, sedangkan Prabowo mengusung wacana nasionalisme keras, stabilitas, dan kekuatan negara (Mietzner, 2015). Kedua kampanye tidak hanya bertumpu pada program rasional, tetapi juga menggunakan simbolisme yang menyentuh emosi dan identitas politik pemilih.

Fenomena politik identitas juga mencuat selama periode ini, terlebih setelah Pilkada DKI Jakarta 2017 yang memunculkan mobilisasi besar kelompok Islam konservatif dalam aksi-aksi seperti 212. Demonstrasi tersebut bukan hanya mencerminkan kekecewaan terhadap elite politik tertentu, tetapi juga memperlihatkan bagaimana agama menjadi alat mobilisasi politik yang efektif di tengah masyarakat

perkotaan dan kelas menengah bawah (Aspinall & Mietzner, 2019; The Conversation, 2016). Lemahnya institusionalisasi partai politik mendorong politisi untuk memanfaatkan isu-isu identitas demi meraih dukungan elektoral. Hal ini berpotensi mengalihkan perhatian dari isu-isu substansial dan merusak modal sosial masyarakat (Bawaslu.go.id, 2020)

Akibat dari polarisasi yang terjadi, masyarakat tidak hanya memilih berdasarkan preferensi rasional, tetapi juga karena identifikasi emosional terhadap kandidat. Hal ini diperparah oleh masifnya penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bersifat partisan, bahkan manipulatif. Banyak warga kemudian terjebak dalam "echo chamber" politik, yaitu situasi ketika kelompok masyarakat hanya menerima informasi yang memperkuat keyakinan mereka sendiri dan menolak informasi dari pihak lain, yang memperdalam pembelahan sosial (Aspinall & Mietzner, 2019).

Di tengah lemahnya lembaga-lembaga demokrasi dalam menengahi konflik politik, polarisasi ini terus tumbuh dan bahkan membentuk basis sosial yang tetap hingga Pilpres 2019. Kembali berhadapannya Jokowi dan Prabowo dalam kontestasi pemilu 2019 mengakibatkan eskalasi emosi politik masyarakat yang semakin intens, dengan munculnya narasi seperti "cebong" vs "kampret" yang mereduksi identitas politik warga menjadi dua kubu ekstrem yang saling menegasikan. Narasi ini menciptakan realitas sosial baru, bahwa perbedaan pilihan politik menjadi sumber konflik personal dan komunitas, bahkan hingga ke lingkungan keluarga dan pertemanan (Aspinall & Mietzner, 2019; Tapsell, 2018).

Lebih jauh, polarisasi ini tidak hanya bersifat horizontal (masyarakat dengan masyarakat), tetapi juga vertikal (masyarakat terhadap negara). Sebagian kelompok masyarakat melihat pemerintah sebagai aktor yang "mewakili" kelompok mereka, sementara yang lain merasa negara telah dikuasai oleh pihak yang berseberangan secara ideologis atau identitas. Hal ini berkontribusi pada menurunnya kepercayaan antarwarga dan melemahnya kohesi sosial, dua elemen penting dalam menjaga demokrasi deliberatif.

Masyarakat sipil selama periode ini juga menunjukkan keterlibatan yang aktif namun tidak selalu efektif, dengan maraknya aksi-aksi protes di media sosial, namun minim artikulasi di ranah kebijakan publik formal. Di sisi lain, ketidakpercayaan terhadap institusi negara seperti Polri, DPR, hingga KPK semakin meluas, khususnya setelah kasus kriminalisasi terhadap penyidik KPK dalam konflik dengan Polri pada awal 2015 (Mietzner, 2015).

Pada akhir periode pertamanya, Jokowi berhasil mengonsolidasikan kekuasaan dengan memperluas koalisi pemerintahan dan memanfaatkan sentimen populisme serta simbolisme pembangunan. Namun, keberhasilan itu juga membawa dampak pada proses demokratisasi, khususnya dalam menurunnya kualitas check and balances dan menguatnya politik transaksional. Sistem presidensial yang seharusnya kuat, justru rentan terhadap kooptasi elit akibat lemahnya pelembagaan partai dan absennya oposisi yang efektif di parlemen.

Kuatnya pragmatisme politik di kalangan elite yang tercermin dalam bergabungnya partai oposisi ke dalam koalisi pemerintah juga mengubah persepsi publik tentang batas antara penguasa dan oposisi. Hal ini membuat masyarakat mengalami kebingungan politik, karena oposisi kehilangan fungsi kontrol, dan partai-partai dianggap tidak memperjuangkan ideologi, melainkan sekadar kekuasaan.

2.2.2 Dinamika Politik Indonesia pada Periode Kedua Jokowi

Pemilu 2019 merupakan tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia sebagai pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilihan presiden dan legislatif. Dalam pemilihan legislatif, sembilan partai politik berhasil melampaui ambang batas parlemen 4%, dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih 128 kursi, diikuti oleh Golkar (85 kursi), Gerindra (78 kursi), dan partai lainnya.

Koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang terdiri dari PDIP, Golkar, NasDem, PKB, dan PPP, menguasai mayoritas dengan 349 kursi atau sekitar 60% dari total 575 kursi DPR. Dominasi ini semakin kuat ketika Gerindra dan Demokrat bergabung, meningkatkan jumlah kursi koalisi menjadi 481 atau sekitar 84%. Koalisi pemerintahan mencakup hampir seluruh partai politik di parlemen,

menyisakan hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai oposisi. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya fungsi check and balance dalam sistem demokrasi Indonesia. Meskipun Jokowi berhasil merangkul sebagian besar kekuatan politik di parlemen, kondisi ini justru memicu kekhawatiran akan hilangnya fungsi oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan (Hille, 2024).

Fenomena ini mencerminkan "kartelisasi partai" di Indonesia, yaitu ketika partai-partai politik cenderung bergabung dalam koalisi pemerintahan demi mendapatkan posisi strategis, meskipun sebelumnya berada di pihak oposisi. Pemilihan umum yang bersifat head-to-head telah memperkuat praktik koalisi politik pragmatisme, yang berujung pada otokrasi yang sah secara hukum namun tidak konsisten dan bias. Upaya pemberantasan korupsi juga dihadapkan pada tantangan karena terjebak dalam perangkap politik kartel yang rapi, termasuk melalui pelemahan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi undang-undang (Risdiyanto, 2021). Hal ini mengaburkan batas antara oposisi dan pemerintah, serta melemahkan fungsi check and balance dalam sistem demokrasi.

Salah satu momen krusial yang mencerminkan puncak kekecewaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo terjadi pada tahun 2019, ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi ini dinilai mengubah secara mendasar struktur dan fungsi KPK sebagai lembaga independen yang selama ini menjadi simbol utama gerakan anti-korupsi di Indonesia. Beberapa poin revisi yang kontroversial antara lain adalah dibentuknya Dewan Pengawas KPK yang dipilih langsung oleh Presiden, pembatasan dalam proses penyadapan, serta kewajiban KPK untuk berkoordinasi dengan penegak hukum lain dalam penyelidikan dan penuntutan (Indonesian Corruption Watch, 2019).

Substansi revisi tersebut dianggap sebagai bentuk pelemahan sistematis terhadap KPK. Masyarakat sipil, aktivis anti-korupsi, akademisi, dan mahasiswa menilai bahwa upaya revisi UU ini tidak hanya membatasi kewenangan teknis lembaga tersebut, tetapi juga mengintervensi independensinya secara politik (ICW, 2019). KPK yang selama ini relatif bebas dari tekanan eksekutif dan legislatif diposisikan kembali

di bawah kendali negara. Hal ini menandai kemunduran besar dalam agenda reformasi sektor hukum pasca reformasi 1998.

Reaksi publik sangat kuat. Gelombang demonstrasi yang dipicu oleh pengesahan revisi UU KPK menjalar ke seluruh penjuru negeri. Aksi yang dikenal sebagai “*Gejayan Memanggil*” di Yogyakarta menjadi simbol perlawanan kaum muda. Tidak hanya mahasiswa, tetapi juga seniman, dosen, jurnalis, dan kelompok masyarakat adat turun ke jalan. Di Jakarta, ribuan mahasiswa mengepung gedung DPR dengan tuntutan yang tidak hanya menolak revisi UU KPK, tetapi juga mendesak pembatalan RKUHP yang bermasalah, penolakan pasal-pasal bermuatan kolonial dalam RUU Pertanahan dan RUU Pemasyarakatan, serta penghentian kriminalisasi aktivis (CNBC Indonesia, 2024).

Demonstrasi ini kemudian dikenang sebagai salah satu mobilisasi masyarakat sipil terbesar sejak gerakan Reformasi 1998. Aksi berlangsung serentak di lebih dari 30 kota besar dan kecil, seperti Bandung, Semarang, Malang, Makassar, Medan, dan Surabaya. Namun, alih-alih dialog terbuka, respon pemerintah pada saat itu cenderung represif. Aparat keamanan menggunakan gas air mata, kekerasan fisik, hingga menangkap ratusan mahasiswa. Bahkan, beberapa demonstran dilaporkan tewas, seperti Randi dan Yusuf Kardawi di Kendari, yang memicu kecaman luas dari publik dan lembaga HAM nasional (Komnas HAM, 2020). Peristiwa ini mengindikasikan bahwa ada jurang antara ekspektasi masyarakat terhadap demokrasi yang partisipatif dan arah kebijakan negara yang semakin elitis dan tersentralisasi. Gerakan penolakan revisi UU KPK menjadi simbol bahwa masyarakat sipil Indonesia masih memiliki daya hidup politik yang kuat, namun juga memperlihatkan bahwa ruang partisipasi mereka semakin sempit dalam rezim yang semakin anti-kritik.

Pemerintahan Jokowi dihadapkan pada suatu masa yang menghambat jalannya pemerintahan, ekonomi, serta kehidupan masyarakat, yaitu pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Pandemi yang melanda Indonesia sejak awal 2020 tidak hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga memperlihatkan berbagai dinamika politik yang signifikan. Pemerintahan Joko Widodo menghadapi tekanan besar dalam menyeimbangkan penanganan pandemi dengan stabilitas politik dan ekonomi. Namun,

alih-alih menjadi momentum penguatan tata kelola demokrasi dan akuntabilitas publik, pandemi justru dimanfaatkan oleh elit politik untuk memperkuat kontrol atas ruang sipil dan memperluas kekuasaan eksekutif.

Salah satu indikator utama dari kecenderungan ini adalah penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk merespons krisis, seperti Perppu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Undang-undang ini memberikan kewenangan sangat luas kepada pemerintah dalam mengelola anggaran negara, termasuk pengeluaran besar-besaran tanpa mekanisme kontrol legislatif maupun yudisial yang memadai (PSHTN UI, 2020). Banyak pengamat mengkritik bahwa Perppu tersebut membuka ruang impunitas, karena pasal-pasalinya menyatakan bahwa kebijakan keuangan pemerintah selama pandemi tidak dapat digugat secara pidana maupun perdata (Reininda dkk, 2022).

Selain itu, pemerintah tetap mendorong pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di tengah pandemi. Undang-undang ini diklaim bertujuan untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja, namun banyak elemen masyarakat menilai bahwa proses legislasi dilakukan secara terburu-buru dan minim partisipasi publik. Protes terhadap UU Ciptaker meletus di berbagai kota pada Oktober 2020, di tengah pembatasan sosial yang ketat. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pemerintah memanfaatkan pandemi untuk membatasi ruang aksi dan mobilisasi publik.

Di tingkat lokal, pandemi juga memperkuat praktik-praktik patronase politik. Penyaluran bantuan sosial (bansos) sering kali dipolitisasi, terutama menjelang Pilkada Serentak 2020. Banyak laporan menyebut bahwa bansos digunakan sebagai alat kampanye terselubung oleh calon petahana, dan distribusinya tidak merata, bahkan rawan dikorupsi (ICW, 2022). Kasus korupsi bansos yang melibatkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara memperkuat narasi bahwa pandemi telah menjadi ladang baru untuk penyalahgunaan kekuasaan.

Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 memperlihatkan kecenderungan konsolidasi kekuasaan oleh pemerintah pusat, dengan dalih stabilitas dan efektivitas

kebijakan. Namun di sisi lain, proses tersebut sering kali mengorbankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Masyarakat sipil yang ingin bersuara pun dibatasi, baik melalui pembatasan fisik karena pandemi maupun melalui regulasi yang semakin represif, seperti UU ITE dan pengawasan media sosial (Yandra dkk, 2022).

2.2.3 Dinamika Politik Indonesia pada Pemilihan Umum 2024

Pemilihan Umum 2024 menjadi titik penting dalam transisi kekuasaan politik Indonesia dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuju pemerintahan baru. Namun, alih-alih menjadi ajang penguatan demokrasi, Pemilu 2024 justru menampilkan dinamika politik yang sarat kontroversi, konsolidasi kekuasaan elit, serta indikasi kemunduran prinsip-prinsip demokrasi substansial.

Pemilu 2024 di Indonesia memperlihatkan fenomena politik yang kembali menegaskan watak pragmatis sistem multipartai Indonesia, yaitu terbentuknya koalisi-koalisi yang sangat cair dan besar. Sejak awal, peta kekuatan politik mengerucut pada tiga poros utama: Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mendukung Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar, serta koalisi yang mendukung Ganjar Pranowo–Mahfud MD di bawah dominasi PDIP.

Gambar 2.1 Peta Koalisi Pilpres 2024



Sumber : Katadata.co.id, 2024

Fenomena ini menunjukkan bahwa pembentukan koalisi lebih didasarkan pada kalkulasi elektoral pragmatis ketimbang kesamaan ideologi atau platform partai. Sebagai contoh, Koalisi Indonesia Maju berhasil menghimpun kekuatan dari partai-partai besar seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan belakangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Masuknya PSI yang relatif kecil secara elektoral tetapi memiliki kedekatan personal dengan Presiden Jokowi memperlihatkan bagaimana loyalitas politik lebih ditentukan oleh faktor personal dan distribusi kekuasaan, bukan garis ideologi partai

Pemilu 2024 menandai meningkatnya peran generasi muda sebagai aktor penting dalam peta politik Indonesia. Berdasarkan data KPU, 55% pemilih pada Pemilu 2024 berasal dari kelompok usia 17–40 tahun, yang sering disebut sebagai Generasi Milenial dan Generasi Z (KPU, 2024). Kelompok ini menjadi target utama dalam strategi kampanye karena jumlahnya yang masif dan pengaruhnya terhadap dinamika politik digital.

Media sosial, khususnya TikTok, Instagram, X (Twitter), dan YouTube, menjadi arena dominan kampanye politik. Kandidat dan partai politik tidak lagi hanya mengandalkan kampanye tatap muka, tetapi juga memanfaatkan *content creator*, *influencer*, hingga podcast politik sebagai sarana efektif untuk menjangkau pemilih muda (Lestari dkk, 2024). Misalnya, Prabowo–Gibran menggunakan narasi visual seperti tarian "gemoy" untuk menarik simpati pemilih muda, sedangkan Anies–Muhaimin memaksimalkan jejaring diskursus kritis di Twitter.

Pemilu 2024 secara prosedural dinilai berhasil. Penyelenggaraan pemilu berjalan aman, partisipasi pemilih tinggi (sekitar 82,3%, menurut KPU), dan mekanisme perhitungan suara berlangsung sesuai standar administrasi. Meskipun begitu, keberhasilan procedural tersebut tidak diimbangi dengan kualitas demokrasi substansif. Salah satu masalah utama adalah kartelisasi partai politik, di mana hampir seluruh partai besar bergabung dalam koalisi pemerintahan sehingga menyisakan oposisi yang sangat lemah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap hilangnya mekanisme *check and balances* yang seharusnya menjadi pilar demokrasi (Putra,

2024). Selain itu, praktik masih marak, ditunjukkan dengan laporan pemantau pemilu yang menemukan penyebaran uang, distribusi bantuan sosial yang dipolitisasi, serta keterlibatan aparat sipil negara dalam mendukung kandidat tertentu (Indonesia Corruption Watch, 2024).

Pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka tampil sebagai pemenang dengan perolehan suara sebesar 58,6% atau sekitar 96,2 juta suara sah. Pasangan ini unggul jauh atas pesaingnya, Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar yang meraih 40,1 juta suara (24,9%), serta Ganjar Pranowo–Mahfud MD yang hanya memperoleh 27,0 juta suara (16,5%). Kemenangan satu putaran Prabowo–Gibran mencerminkan konsolidasi kekuatan politik lama dan baru, di mana figur Prabowo yang telah berulang kali maju akhirnya berhasil didorong dengan dukungan elektoral tambahan dari kehadiran Gibran sebagai representasi politik dinasti Jokowi.

Sementara itu, hasil pemilihan legislatif memperlihatkan peta kekuatan partai yang cukup berimbang namun tetap dikuasai oleh partai-partai besar. Dari 18 partai yang ikut serta, hanya delapan partai berhasil melampaui ambang batas parlemen 4 persen. PDI Perjuangan (PDIP) masih meraih suara terbanyak dengan 16,7% suara dan 110 kursi DPR, disusul oleh Golkar dengan 15,3% suara dan 102 kursi, serta Gerindra yang memperoleh 13,2% suara dan 86 kursi. Di bawahnya, terdapat NasDem dengan 69 kursi, PKB dengan 68 kursi, PAN dengan 48 kursi, PKS dengan 53 kursi, dan Partai Demokrat dengan 44 kursi. Dengan hasil tersebut, konstelasi parlemen periode 2024–2029 masih menunjukkan dominasi tiga besar partai nasionalis (PDIP, Golkar, dan Gerindra), meskipun tidak ada satu pun partai yang mampu mencapai mayoritas absolut.

Pasca Pemilu 2024, Indonesia memasuki fase yang dipenuhi ketegangan politik dan dinamika stabilisasi kekuasaan. Pada tahap awal, protes bermunculan ketika berbagai aktor politik menolak dugaan intervensi dalam proses pemilu serta menuntut audit sistem informasi KPU. Ketegangan semakin meningkat ketika pasangan calon yang kalah mempertimbangkan pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, meskipun putusan lembaga tersebut kemudian menetapkan bahwa kemenangan

Prabowo dan Gibran sah dan tidak dibatalkan (Yanuar Nugroho, ISEAS Yusof Ishak Institute, 2024).

Perkembangan berikutnya terjadi pada tingkat elite politik melalui pembentukan koalisi KIM Plus, yaitu koalisi pemerintahan yang diperluas dengan bergabungnya NasDem, PKB, PKS, Ummat, dan Perindo. Konfigurasi baru ini menghasilkan penguasaan mayoritas besar di parlemen dan menyisakan PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai di luar pemerintahan. Kondisi tersebut menciptakan ketidakseimbangan kekuatan politik, karena oposisi menjadi lemah sementara blok pemerintahan semakin solid secara institusional. Meskipun demikian, legitimasi elite tetap sangat bergantung pada penerimaan masyarakat luas.

Pada tingkat masyarakat, muncul gelombang penolakan terhadap berbagai upaya konsolidasi kekuasaan yang dianggap menguntungkan elite. Gerakan Emergency Alert for Indonesia mencuat ketika publik menolak RUU Pilkada yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mobilisasi ini mencapai puncaknya pada demonstrasi nasional tanggal 22 Agustus 2024 yang menyoroti bahaya politik dinasti serta risiko penyempitan ruang demokrasi lokal (Berenschot, 2024).

2.3 Masyarakat Populis Indonesia

Konsep *masyarakat populistis* merujuk pada konstruksi sosial dan politik mengenai “rakyat” sebagai entitas homogen yang diposisikan sebagai pihak yang berseberangan dengan elite yang dianggap korup, tidak responsif, atau jauh dari kebutuhan publik. Dalam teori populisme, masyarakat populistis bukan merupakan kategori demografis yang bersifat objektif, melainkan identitas politik yang terbentuk melalui proses artikulasi diskursif. Ernesto Laclau (2005) menjelaskan bahwa “the people” dalam populisme merupakan hasil artikulasi rantai ekuivalensi yang menggabungkan berbagai keluhan sosial menjadi satu identitas kolektif yang mampu memobilisasi perlawanan terhadap kekuasaan yang mapan. Cas Mudde (2004) menyatakan bahwa populisme berfungsi sebagai ideologi tipis yang membelah masyarakat menjadi dua kelompok antagonistik, yaitu “rakyat murni” dan “elite korup,” serta mengklaim bahwa politik seharusnya mengekspresikan kehendak umum

rakyat. Jan-Werner Müller (2016) menambahkan bahwa masyarakat populis sering memandang dirinya sebagai satu-satunya representasi sah dari rakyat sehingga kecenderungan ini dapat mengarah pada delegitimasi oposisi dan pengabaian prinsip pluralisme. Dengan demikian, masyarakat populis terbentuk melalui kombinasi pengalaman ketidakpuasan struktural dan produksi identitas politis yang dimobilisasi oleh pemimpin atau gerakan populis untuk menantang tatanan institusional yang berlaku.

Populisme di Indonesia menjadi suatu fenomena bagi sejarah demokrasi di negara ini. Setidaknya sejak pemilihan presiden pada Pemilu tahun 2014, isu populisme telah menjadi strategi kekuasaan pada dinamika politik di Indonesia. Populisme yang secara umum mengungkapkan pertentangan antara rakyat kebanyakan (*The People*) yang tidak berkuasa melawan segelintir kecil elit politik yang berkuasa (Madung, 2018). Hal tersebut, diawali oleh kegagalan demokrasi dalam mengakomodir gagasan dan kebutuhan rakyat. Dalam hal ini, partai politik dan lembaga legislatif dianggap tidak dapat menjadi representasi bagi masyarakat sehingga ketimpangan sosial antara *the people* dan elit tidak dapat terhindarkan. Karena keadaan ini menciptakan kekacauan dan tak adanya manajemen konflik oleh karena krisis kepemimpinan, populisme hadir sebagai seperangkat kepercayaan masyarakat akan pemimpin yang dianggap dapat mengangkat kebutuhan hidup mereka (Rahmawati, 2018)

Populisme, dalam konteks politik modern, bukan semata-mata ideologi, tetapi lebih tepat dipahami sebagai pendekatan politik yang menempatkan “rakyat” sebagai entitas moral yang homogen berhadapan dengan “elit” yang dianggap korup atau jauh dari kepentingan rakyat (Mudde, 2004). Pendekatan ini sering kali bersifat lentur secara ideologis, yang memungkinkan pemimpin untuk mengadopsi berbagai posisi politik tanpa komitmen ideologis yang kuat. Dengan demikian, populisme dapat dimanfaatkan sebagai alat politik yang sangat pragmatis.

Dengan sistem Pemilu *one man one vote*, tentunya penguasaan terhadap basis elektoral menjadi kunci kemenangan yang sangat penting. Populisme sebagai suatu strategi yang berfokus pada mengakomodir persepsi dan tuntutan masyarakat banyak menjadi alat yang dapat digunakan untuk menarik dukungan publik. Propaganda dan

menebar kharisma personal seorang politikus dinilai lebih menarik bagi konstituen, alih-alih mengedepankan gagasan ideologis dan tampil sebagai seorang edukator (Rahmawati, 2018). Tentunya hal ini akan berimplikasi pada pertarungan politik yang cenderung *ad hominem*, yaitu serangan terhadap personalia lawan politik, alih-alih menghadirkan adu wacana gagasan pada panggung politik.

2.3.1 Populisme Jokowi

Dengan latar belakang bukan berasal dari keluarga elit dan mapan, Jokowi hadir sebagai tokoh populis yang mengidentifikasikan dirinya sebagai politikus yang berasal dari rakyat. Latar belakang tersebut menjadi hal penting bagi Jokowi untuk menjalankan kampanyenya sebagai representasi rakyat yang diistilahkan sebagai *popular agency*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam demokrasi (Aspinall, 2013). Oleh karena itu, sebagai representasi langsung dari rakyat, Jokowi diharapkan dapat membawa aspirasi dan agenda rakyat yang seringkali dikendalikan atau disalurkan secara terbatas oleh elit politik. Dengan pendekatan ini, populisme mencirikan dirinya sebagai konfrontasi hegemoni yang ada melalui konstruksi diskursif yang kemudian membagi masyarakat ke dalam dua kategori, yaitu blok kekuasaan melawan blok rakyat (Mudde dan Kaltwasser, 2012)

Sebenarnya, populisme yang dibawa oleh Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014 bukanlah hal yang baru. Dengan konsep yang sama, ia memenangkan Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (Pilgub DKI) Jakarta pada Tahun 2012. Sebagai seorang populis yang muncul dari luar sistem politik yang mapan, politik populis memiliki cita rasa yang membangkitkan gerakan dan didukung oleh antusiasme yang menarik orang-orang yang biasanya apolitis ke arena politik (Hamid, 2014). Populisme Jokowi juga diperkuat dengan pendekatan “blusukan” yang ditujukan untuk mengetahui problem masyarakat secara langsung dan berdiskusi terkait solusinya (Rahmawati, 2018). Partai pengusung Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang melabeli diri dengan jargon “partai wong cilik” menjadi penyempurna bagi citra “pro rakyat” Jokowi. Hasilnya, Jokowi bersama dengan Basuki Tjahaja

Purnama (Ahok) sebagai wakilnya memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2012 dengan perolehan suara 53,82% mengungguli pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli.

Berbeda dengan gaya populisme konfrontatif ultra-nasionalis milik Prabowo Subianto sebagai lawan politiknya pada Pemilu 2014, Marcus Mietzer menyebut pendekatan populis yang dilakukan oleh Jokowi sebagai *technocratic populism* (populisme teknokratik). Kampanye populis klasik Prabowo dinilai gagal karena, tidak seperti negara lain yang populisme klasiknya berhasil sebab negaranya sedang mengalami krisis akut yang mengancam jiwa, mayoritas pemilih secara umum tidak menginginkan perubahan rezim sebagaimana narasi politik yang selalu digaungkan Prabowo.

Populisme Teknokratik Jokowi mengkampanyekan gagasan yang menentang kembalinya pemerintahan otokratis yang mana merupakan penggambaran seorang Prabowo Subianto sebagai seorang yang berasal dari keluarga elit dan mapan dari lingkaran keluarga Soeharto. Secara pragmatis, gagasan Jokowi memprioritaskan perbaikan layanan sehari-hari daripada visi politik yang terkesan utopis serta menjanjikan untuk mempertahankan demokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa apa yang dikehendaki sebagian pemilih pada saat itu bukanlah populisme penuh seperti yang dilakukan oleh Hugo Chávez, yaitu populisme dengan retorika yang kuat dan personal sebagai serangan terhadap elit politik dengan menegaskan dirinya sebagai rakyat yang kontra dengan rezim korup atau pro-kapitalis, melainkan suatu bentuk populisme ringan (Mietzer, 2015).

Dalam buku *Man of Contradictions : Joko Widodo and The Struggle to Remake Indonesia* karya Ben Bland, pendekatan populisme Jokowi ini diterima oleh banyak teknokrat yang jenuh akan korupsi dan ketidak-efisiensi birokrasi. Bagi kaum demokrat liberal dan progresif, Jokowi menjadi sosok alternatif yang menyegarkan jika dibandingkan dengan sosok lain yang berlatar belakang jenderal, taipan, dan keturunan mantan diktator. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan dorongan elektoral pada segmentasi pemilik usaha kecil dan orang lain yang mengharapkan hadirnya pemerintahan yang bersih dan efektif.

2.3.2 Konsep Populisme Teknokratik Jokowi

Konsep *Technocratic Populism* yang dilakukan Jokowi mengacu pada kombinasi antara retorika populis, yakni klaim keterwakilan terhadap rakyat biasa, dengan janji efisiensi, rasionalitas, dan manajemen profesional dalam pengelolaan negara (Mietzner, 2015). Namun, dalam konteks Indonesia, populisme teknokratik yang dikembangkan oleh Jokowi lebih tepat dipahami bukan sebagai refleksi dari suatu ideologi politik yang mapan, melainkan sebagai strategi pragmatis untuk memenangkan dukungan elektoral dari berbagai segmen pemilih. Pendekatan ini cenderung memprioritaskan efisiensi pembangunan ketimbang keadilan sosial. Meski dikemas dalam bahasa kerakyatan, kebijakan-kebijakan seperti program infrastruktur masif atau deregulasi investasi lebih banyak berpihak pada kepentingan ekonomi makro dan elite bisnis, ketimbang menyelesaikan persoalan mendasar rakyat seperti ketimpangan, upah minimum, atau kesejahteraan petani.

Retorika populisme yang diusung oleh Joko Widodo sejak awal karier politiknya membentuk citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, sederhana, dan antielit. Namun dalam praktiknya, populisme ini justru sering kali bertabrakan dengan tindakan-tindakan politiknya yang menunjukkan kompromi dengan elite dan oligarki. Populisme Jokowi tidak konsisten sebagai proyek ideologis, melainkan lebih sebagai strategi politik yang bersifat sementara dan oportunistik. Sub-sub bagian berikut ini akan menguraikan bentuk-bentuk inkonsistensi tersebut secara sistematis.

Ambiguitas populisme Jokowi semakin jelas ketika retorika kerakyatan tidak dibarengi dengan upaya struktural untuk melawan dominasi oligarki. Ben Bland (2020), dalam bukunya *Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia*, menyebut Jokowi sebagai figur yang dekat dengan rakyat secara simbolik, tetapi dalam praktiknya sangat berhati-hati menjaga hubungan erat dan kompromistis dengan elite dan birokrasi formal. Ketidakterlibatan Jokowi dalam wacana perlawanan terhadap oligarki atau upaya sistemik untuk memperkuat partisipasi rakyat secara substantif dalam koridor reformasi institusional menegaskan bahwa populisme yang Jokowi usung tidak dimaksudkan sebagai alat transformasi sosial, melainkan sebagai instrumen legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan.

Meskipun Jokowi kerap diposisikan sebagai pemimpin yang berasal dari luar lingkaran elite tradisional, realitas politik setelah Jokowi menjabat sebagai Presiden menunjukkan hal sebaliknya. Jokowi tidak menunjukkan upaya serius untuk mendisrupsi struktur oligarki politik-ekonomi yang mendominasi Indonesia sejak era Orde Baru. Sebaliknya, Jokowi justru beroperasi dan mempertahankan kekuasaannya dalam kerangka oligarki yang direorganisasi, bukan direformasi secara fundamental (Hadiz & Robison, 2017).

Salah satu indikasi kuat dari kooptasi terhadap oligarki adalah keterlibatan tokoh-tokoh elite dalam lingkaran inti kekuasaan Jokowi. Pengangkatan Luhut Binsar Pandjaitan, seorang figur militer dan pengusaha terkemuka, sebagai menteri dan tokoh berpengaruh dalam berbagai aspek pemerintahan menunjukkan adanya konsolidasi kekuasaan yang bergantung pada elite politik dan bisnis. Luhut tidak hanya berperan sebagai pembantu presiden dalam bidang teknis, tetapi juga sebagai aktor politik strategis yang menjembatani hubungan antara negara, militer, dan korporasi besar. Pengangkatan ini menunjukkan suatu pola kooptasi politik dan reproduksi oligarki. Seperti yang ditegaskan Vedi Hadiz, populisme dalam konteks Indonesia sering kali bukan membebaskan rakyat dari elite, tetapi justru menjadi bagian dari strategi elite untuk mempertahankan kekuasaan (Hadiz & Robison, 2017).

Secara empiris, populisme Jokowi tidak pernah membawa perubahan substansial terhadap struktur kekuasaan elit. Dalam berbagai penelitian, koalisi pemerintahan Jokowi justru memperlihatkan tingkat kompromi yang tinggi terhadap kepentingan oligarki dan elite ekonomi-politik (Winters, 2011; Hadiz & Robison, 2017). Langkah politik Jokowi yang merangkul Prabowo Subianto, lawan politik utama dalam dua pemilu presiden berturut-turut, ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan juga mencerminkan strategi konsolidasi politik berbasis koalisi elit. Prabowo yang selama masa kampanye digambarkan sebagai representasi kekuatan otoriter dan bagian dari warisan Orde Baru justru kemudian diberi posisi strategis dalam pemerintahan. Hal ini memperjelas bahwa orientasi kekuasaan Jokowi tidak diarahkan untuk membangun gerakan struktural rakyat, melainkan untuk memperluas dan menstabilkan aliansi politik dengan elite lama demi menjamin keberlangsungan

kekuasaan eksekutif. Pola ini menggambarkan bagaimana populisme teknokratik yang dipraktikkan Jokowi bukanlah proyek ideologis pembebasan rakyat, melainkan bentuk kompromi strategis dengan struktur oligarkis yang sudah mapan. Hal ini menunjukkan bahwa narasi populis hanya menjadi instrumen elektoral untuk memperoleh legitimasi dari massa pemilih, tanpa disertai dengan agenda transformasi struktural yang konsisten.

Pendekatan teknokratis yang dibawahnya, seperti penekanan pada pembangunan infrastruktur, reformasi pelayanan publik, dan efisiensi birokrasi, ditujukan untuk menarik segmen kelas menengah dan profesional yang jenuh dengan birokrasi korup. Jokowi, dalam hal ini, berhasil memainkan dua kutub sekaligus yaitu sebagai simbol rakyat kecil sekaligus sebagai administrator rasional. Konfigurasi inilah yang disebut Marcus Mietzner (2015) sebagai *technocratic populism*. Namun, dalam realitasnya, ini lebih merupakan kompromi elektoral daripada agenda ideologis yang konsisten.

Selain itu, Jokowi dengan gagasan populisnya menggagas wacana-wacana yang menitikberatkan pada konsistensi perjuangan struktural rakyat tertindas, maka seharusnya isu redistribusi tanah, kesejahteraan buruh, dan keadilan ekonomi menjadi prioritas. Namun, meninjau Nawacita sebagai agenda prioritas Jokowi sebagaimana yang diwacanakan pada periode pertamanya, reforma agraria yang dijanjikan hanya berjalan dalam skema sertifikasi tanah, bukan redistribusi tanah yang menyentuh struktur ketimpangan agrarian (Saparini, 2020). Padahal, sertifikasi hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan yang sudah ada, dan tidak menyentuh persoalan pokok berupa penguasaan tanah yang timpang oleh korporasi besar dan tuan tanah (AMAN, 2018)

Lebih jauh lagi, keberpihakan terhadap kelas pekerja juga dipertanyakan melalui lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang disahkan pada tahun 2020. UU ini didesain sebagai bagian dari agenda deregulasi dan kemudahan investasi. Namun, substansinya justru memperlemah perlindungan buruh, seperti pengurangan pesangon, fleksibilitas hubungan kerja, dan ketidakpastian status kerja kontrak. Selain itu, undang-undang ini juga memperbesar kuasa korporasi atas tanah

dan sumber daya alam dengan membuka celah eksploitasi tanpa mekanisme kontrol sosial yang kuat (Baker, 2020).

Penolakan luas terhadap Omnibus Law datang dari berbagai elemen masyarakat, terutama serikat buruh, mahasiswa, akademisi, dan aktivis lingkungan, yang menilai bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan memperburuk kondisi rakyat kecil (Ford, 2020). Aksi demonstrasi besar-besaran yang berlangsung di berbagai kota pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan besar antara narasi populisme kerakyatan yang diusung Jokowi dengan praktik kebijakan ekonomi yang justru melayani kepentingan kapitalisme korporat (Tempo, 2020). Dalam narasi populisme, rakyat adalah aktor utama yang harus dilindungi oleh negara. Namun dalam kebijakan ini, pemerintah justru dianggap mengabaikan suara rakyat dan memprioritaskan kepentingan investasi. Ini memperkuat tesis bahwa populisme dalam kepemimpinan Jokowi lebih merupakan alat komunikasi politik pragmatis ketimbang komitmen terhadap agenda transformasi sosial (Mietzner, 2020).

Secara teoretis, pendekatan ini selaras dengan konsep pragmatisme politik sebagaimana dijelaskan oleh William James dan Richard Rorty, bahwa kebijakan atau tindakan politik tidak diukur dari kebenaran absolut atau ideologis, melainkan dari seberapa efektif ia bekerja dalam konteks sosial tertentu. Populisme dalam konteks Jokowi adalah cara yang fleksibel, terukur, dan adaptif untuk mendapatkan dukungan rakyat, menjaga stabilitas kekuasaan, serta menghadapi tantangan dari sistem politik yang tidak sepenuhnya demokratis secara substantif.

2.4 Pengelolaan Citra Publik Jokowi

Salah satu aspek paling menonjol dalam gaya kepemimpinan dan komunikasi politik Jokowi adalah praktik blusukan, yakni kunjungan langsung ke wilayah-wilayah masyarakat miskin, pasar tradisional, dan kawasan informal untuk mendengarkan keluhan warga secara langsung. Praktik ini sering dipandang sebagai bentuk kedekatan antara pemimpin dan rakyat, serta dianggap sebagai simbol kepemimpinan yang merakyat. Namun, kajian-kajian akademis menunjukkan bahwa blusukan lebih

merepresentasikan tindakan simbolik ketimbang programatik, yang artinya ia tidak dirancang untuk menghasilkan perubahan struktural dalam sistem pemerintahan atau partisipasi publik.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rahmawati (2018), blusukan yang dilakukan Jokowi tidak diiringi dengan pelembagaan mekanisme partisipasi warga dalam proses formulasi kebijakan publik. Aspirasi warga yang dihimpun melalui blusukan tidak dimasukkan ke dalam sistem pengambilan keputusan secara terstruktur dan terlembaga, melainkan berakhir sebagai respons-respons insidental yang bersifat kasuistik. Dengan demikian, tidak ada kesinambungan antara komunikasi simbolik yang dibangun melalui blusukan dan proses perumusan kebijakan publik yang berbasis partisipasi.

Selain itu, tidak ditemukan upaya sistematis dari pemerintah untuk membentuk forum-forum warga, musyawarah partisipatif, atau badan konsultatif yang mampu menyalurkan keluhan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam hal ini, blusukan hanya menjadi sarana personalisasi kekuasaan, di mana pemimpin tampil langsung sebagai penyelamat atau problem solver, tanpa memberdayakan struktur kelembagaan yang memungkinkan masyarakat berperan secara aktif dan berkelanjutan dalam proses demokrasi deliberatif.

2.5 Konsolidasi Kekuasaan dan Reduksi Oposisi

Menurut Hadiz dan Robinson, dinamika konsolidasi politik yang biasanya muncul sebagai kelanjutan keberhasilan populisme tidak sepenuhnya terjadi di Indonesia setelah kemenangan Joko Widodo dalam pemilihan presiden. Kemenangan elektoral Jokowi bertumpu pada gaya politik populis yang menonjolkan kedekatan personal, konsultasi langsung, dan komunikasi intensif dengan masyarakat pemilih. Namun, kemenangan tersebut tidak disertai reformasi mendasar atas sistem politik yang diwariskan dari Orde Baru dan masih dikendalikan oleh jejaring oligarki.

Dalam penerapannya, Jokowi tidak berhasil membangun konsolidasi demokratis jangka panjang. Alih-alih mampu merepresentasikan aspirasi rakyat yang memberinya mandat politik, ia terperangkap dalam kompromi dengan kekuatan

oligarkis. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus menghindari tekanan kelompok oligarki, Jokowi memilih strategi pragmatis melalui aliansi dengan partai-partai politik mapan yang berakar pada kepentingan oligarki. Konsekuensinya, berbagai agenda reformasi dan janji pro rakyat yang ia usung pada masa kampanye sulit diwujudkan karena berhadapan dengan resistensi partai-partai politik pendukung pemerintah yang didominasi elite oligarki.

Pada awal masa kepemimpinannya tahun 2014, Jokowi menghadapi tantangan politik yang signifikan di parlemen. Konfigurasi Dewan Perwakilan Rakyat ketika itu didominasi oleh Koalisi Merah Putih yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. Koalisi tersebut menjadi blok oposisi utama terhadap pemerintah dan bahkan menguasai jabatan strategis di parlemen, termasuk kursi Ketua DPR yang dipegang oleh Setya Novanto dari Partai Golkar (Mietzner, 2015). Namun, peta politik ini berubah secara drastis dalam dua tahun pertama pemerintahan Jokowi. Melalui strategi kompromi yang intensif, Partai Golkar resmi bergabung ke dalam barisan pemerintah pada tahun 2015, diikuti oleh Partai Amanat Nasional pada tahun 2016. Masuknya dua partai besar tersebut memperlemah daya tawar Koalisi Merah Putih sekaligus memperkuat posisi Jokowi di parlemen (Slater, 2018).

Kooptasi terhadap partai oposisi menunjukkan pola konsolidasi kekuasaan Jokowi yang bersifat pragmatis. Dengan mengintegrasikan partai besar ke dalam koalisi, Jokowi tidak hanya memperluas dukungan legislatif untuk agenda pemerintah, tetapi juga secara sistematis mengurangi kekuatan oposisi. Menurut Mietzner (2018), strategi ini menghasilkan stabilitas politik jangka pendek karena pemerintah memperoleh dukungan mayoritas di DPR. Akan tetapi, dampaknya adalah melemahnya mekanisme checks and balances, karena oposisi kehilangan basis politik yang cukup kuat untuk melakukan pengawasan yang efektif.

Kecenderungan tersebut semakin terlihat menjelang Pemilu 2019 ketika Jokowi berhasil merangkul hampir seluruh partai besar, termasuk Golkar, Partai Amanat Nasional, PPP, dan Partai Demokrat pada periode kedua. Kondisi ini membuat oposisi formal di parlemen tersisa pada Partai Gerindra dan PKS yang memiliki jumlah kursi

terbatas sehingga tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal (Mietzner, 2019). Fenomena berkurangnya oposisi ini memperlihatkan bahwa politik Indonesia di era Jokowi bergerak menuju model koalisi gemuk yang mengutamakan stabilitas pemerintahan melalui kompromi elite, namun mengorbankan kualitas demokrasi substantif.

Pasca Pemilu 2019, Jokowi dan Prabowo memilih jalur rekonsiliasi yang berlangsung cepat. Pertemuan publik pertama antara keduanya dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2019 dan diikuti beberapa pertemuan berikutnya hingga ketegangan politik mereda. Langkah rekonsiliasi ini kemudian mencapai titik paling signifikan ketika Jokowi secara resmi mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dalam pengumuman kabinet yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Pengangkatan tersebut tidak sekadar bersifat teknis, tetapi menandai pergeseran politik yang mengubah posisi Partai Gerindra dari oposisi menjadi bagian dari lingkaran pengambil keputusan eksekutif.

Gambar 2.2 Pertemuan pertama Jokowi dengan Prabowo pada 13 Juli 2019



Sumber : Presidenri.do.id

Data pemilu dan komposisi DPR menunjukkan betapa besar implikasinya secara numerik. Hasil penetapan KPU untuk DPR periode 2019–2024 menunjukkan bahwa DPR beranggotakan 575 kursi; perolehan kursi utama adalah PDIP (128), Golkar (85), Gerindra (78), NasDem (59), PKB (58), Demokrat (54), PKS (50), PAN

(44) dan PPP (19). Jika dijumlahkan, partai-partai yang secara formal mendukung Jokowi pada saat penghitungan pasca-pemilu (PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP) memiliki 349 kursi dari 575 ($\approx 60,7\%$), sementara Gerindra meraih 78 kursi ($\approx 13,6\%$) dan PKS serta Demokrat masing-masing 50 kursi ($\approx 8,7\%$) dan 54 kursi ($\approx 9,4\%$). Angka-angka kursi ini tercatat di perolehan resmi KPU / rekap media-data pemilu.

Sebelum rekonsiliasi, koalisi penantang (Gerindra + PKS + Demokrat + PAN) memiliki kekuatan parlemen yang jauh lebih besar; setelah Gerindra “bergabung” ke pemerintahan, oposisi yang tersisa dengan basis suara legislatif paling nyata tersisa pada PKS dan Partai Demokrat. Jika hanya menghitung dua partai oposisi terbesar tersebut (PKS 50 + Demokrat 54 = 104 kursi), maka mereka bersama menguasai sekitar 18,1% kursi DPR (104/575), jauh dari mayoritas yang diperlukan untuk menghambat inisiatif legislatif eksekutif (Inter-Parliamentary Union, 2019). Peralihan 78 kursi Gerindra dari ruang oposisi ke pro-pemerintah secara praktis melemahkan kapasitas resistensi parlementer yang terorganisir.

Dengan berkurangnya jumlah kursi oposisi yang solid dan terkoordinasi, DPR cenderung menjadi arena pengesahan agenda eksekutif alih-alih pengawasan kritis. Analisis observatorium politik dan lembaga kajian mencatat bahwa rapprochement Jokowi–Prabowo melembutkan polarisasi elite dan mengubah sifat persaingan partai dari konfrontatif menjadi kooperatif, yaitu sebuah kondisi yang memudahkan laju legislasi pro-pemerintah dan mengurangi hambatan formal terhadap kebijakan kontroversial (Lane, 2021).

Pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan sekaligus membawa Partai Gerindra masuk ke kabinet merupakan langkah yang secara simbolis dan substantif menutup hampir seluruh ruang oposisi di parlemen. Dari sudut pandang pragmatisme politik, langkah ini memang berhasil menurunkan eskalasi polarisasi elite yang sebelumnya tajam akibat kontestasi pemilu yang sarat politik identitas. Jokowi melalui strategi ini membangun stabilitas politik jangka pendek yang memungkinkan agenda pemerintahan berjalan tanpa hambatan berarti di DPR. Namun, stabilitas tersebut dibayar mahal dengan melemahnya fungsi oposisi sebagai mekanisme kontrol independen terhadap kebijakan negara.

Dengan hanya menyisakan PKS dan sebagian kecil Demokrat sebagai oposisi formal, kualitas deliberasi kebijakan publik di DPR mengalami kemerosotan signifikan (Slater, 2018). Oposisi yang terfragmentasi dan minoritas tidak mampu memberikan resistensi berarti terhadap dominasi koalisi gemuk pemerintah. Hal ini terlihat jelas dalam proses legislasi kontroversial, seperti pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 dan revisi Undang-Undang KPK pada 2019, di mana DPR secara mayoritas mendukung agenda eksekutif meskipun mendapatkan penolakan luas dari masyarakat sipil (Aspinall & Berenschot, 2020). Hanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak secara eksplisit, sementara fraksi-fraksi lain yang tergabung dalam koalisi pemerintah tetap memberikan dukungan penuh (Prayoga, 2021). Hal ini menunjukkan bagaimana dominasi koalisi pemerintah di parlemen telah menurunkan daya tawar oposisi dalam merombak, menunda, atau bahkan menggagalkan legislasi kontroversial.

Kondisi ini konsisten dengan temuan bahwa konfigurasi politik pasca bergabungnya Gerindra ke dalam kabinet Jokowi semakin mempersempit ruang oposisi formal di DPR. Dengan lebih dari 80% kursi DPR berada di lingkaran koalisi pemerintah, proses legislasi cenderung bersifat top-down dan minim perdebatan substantif. Mekanisme checks and balances yang seharusnya dijalankan oleh oposisi menjadi tidak efektif, dan DPR berfungsi lebih sebagai stempel politik eksekutif ketimbang sebagai arena deliberasi yang kritis. Dalam konteks teori demokrasi, fenomena ini mengindikasikan pelemahan oposisi institusional yang berdampak pada erosi kualitas demokrasi substantif di Indonesia (Slater, 2018)

Konsolidasi kekuasaan pada era kepemimpinan Jokowi memperlihatkan pola khas demokrasi elektoral di Indonesia, yaitu kecenderungan pragmatis untuk membangun koalisi gemuk melalui kooptasi partai-partai oposisi. Strategi ini memang berhasil menciptakan stabilitas jangka pendek serta mengurangi potensi konflik politik di tingkat elite, namun pada saat yang sama mengikis peran oposisi sebagai mekanisme checks and balances yang vital dalam sistem demokrasi. Absennya oposisi yang kuat di parlemen membuat DPR lebih berfungsi sebagai arena pengesahan kebijakan eksekutif ketimbang ruang deliberasi substantif. Hal ini menegaskan bahwa

konsolidasi politik pasca 2014 hingga periode kedua Jokowi bukanlah konsolidasi demokrasi dalam arti substantif, melainkan konsolidasi kekuasaan yang memperkuat dominasi oligarki dan mereduksi ruang oposisi. Akibatnya, demokrasi Indonesia di bawah Jokowi cenderung bergerak ke arah stabilitas semu yang ditopang oleh kompromi elite, tetapi rentan terhadap delegitimasi karena melemahkan kanal representasi politik rakyat serta mengabaikan prinsip akuntabilitas pemerintahan.

2.6 Kebijakan Publik sebagai Instrumen Kekuasaan Pragmatis

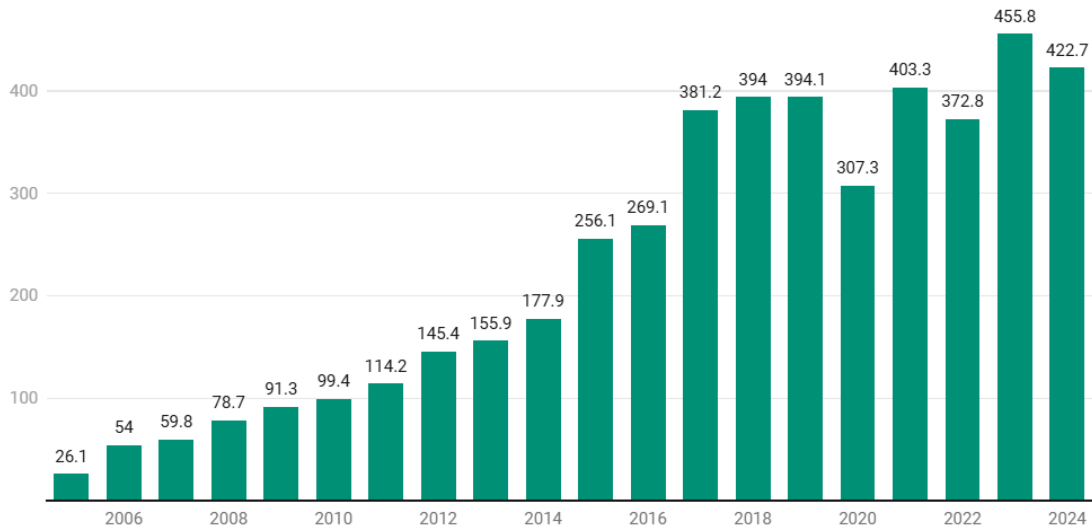
Dalam praktik politik kontemporer di Indonesia, kebijakan publik tidak semata-mata dipahami sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap kepentingan rakyat, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk mempertahankan, memperluas, dan mengonsolidasikan kekuasaan. Perspektif Machiavellian menekankan bahwa kebijakan publik sering kali dirancang bukan hanya berdasarkan prinsip rasionalitas administratif, tetapi juga atas pertimbangan pragmatis yang bertujuan menjaga stabilitas politik dan memperkuat legitimasi penguasa.

Banyak peneliti internasional seperti James Guild kerap menyebut Jokowi sebagai “Presiden Infrastruktur”. Hal tersebut dikarenakan fokus kebijakan Jokowi selama sepuluh tahun pemerintahannya sangat berfokus pada pembangunan infrastruktur. Bahkan, *The Diplomat* menulis sebuah artikel yang berjudul *The Trouble With Indonesia’s Infrastructure Obsession*” (2020) yang menyoroti bagaimana narasi Jokowi memperluas infrastruktur digunakan sebagai simbol visi pembangunan, tetapi disaat yang bersamaan juga mensimplifikasi masalah sosial dan politik. Dalam berbagai artikel yang mengkaji pemerintahan Jokowi sebagai presiden bahkan menilai dominasi infrastruktur di atas aspek pemerintahan lainnya.

Kebijakan pembangunan infrastruktur masif yang ditempuh Presiden Joko Widodo merepresentasikan pilihan strategis dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional. Infrastruktur diposisikan sebagai *enabler* bagi pertumbuhan jangka panjang, mengingat peranannya dalam menurunkan biaya logistik, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperkuat daya tarik investasi asing. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan strukturalis yang menekankan pentingnya intervensi negara dalam

menyediakan prasyarat fisik bagi industrialisasi dan integrasi ekonomi (Todaro & Smith, 2015).

Gambar 2.3 Diagram budget infrastruktur Pemerintahan Indonesia dalam triliun



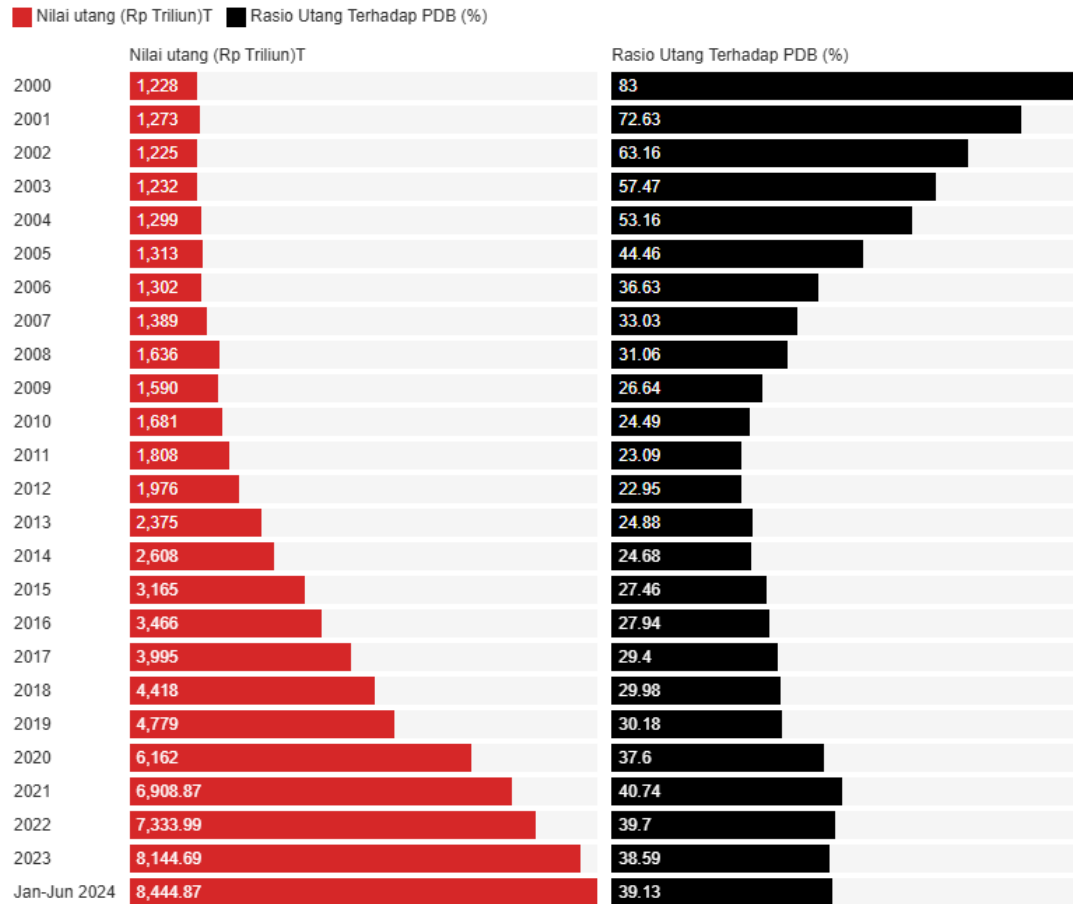
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, alokasi anggaran untuk infrastruktur pada era kepemimpinan Jokowi meningkat drastis dibandingkan dengan era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, terjadi pelonjakan anggaran APBN sebesar 156,2% dari Rp 177,9 Triliun pada 2014 menjadi Rp 455,8 Triliun pada 2023. Secara keseluruhan, alokasi anggaran APBN untuk infrastruktur pada era Jokowi mencapai Rp 3.411,6 Triliun.

Ditinjau dari perspektif fiskal, pembiayaan infrastruktur yang sebagian besar bersumber dari APBN ($\pm 49\%$ dari kebutuhan total) menyebabkan peningkatan signifikan pada stok utang negara. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa utang pemerintah meningkat dari Rp 2.604 triliun pada 2014 menjadi lebih dari Rp 8.000 triliun pada 2024. Namun, secara normatif, rasio utang terhadap PDB masih berada di bawah ambang batas 60% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Dengan demikian, secara teoritis langkah pemerintah masih dapat dikategorikan *fiskally sustainable*, sesuai dengan argumen Keynesian bahwa defisit

dan utang dapat dibenarkan sepanjang dialokasikan untuk belanja produktif yang menghasilkan *multiplier effect*.

Gambar 2.4 Nilai Total Utang Pemerintah Indonesia dan Rasio Utang terhadap PDB



Sumber : Laporan Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia

Kendati demikian, problem muncul pada aspek kualitas dan keberlanjutan proyek. Sejumlah infrastruktur yang dibangun, seperti beberapa ruas tol Trans-Sumatra dan Kereta Cepat Jakarta–Bandung, belum menunjukkan kelayakan finansial yang memadai. Hal ini menimbulkan risiko terjadinya *contingent liabilities*, khususnya melalui BUMN karya yang digenjut untuk membiayai proyek lewat pinjaman perbankan maupun obligasi. Konsep “utang tersembunyi” (*hidden debt*) menjadi

relevan di sini, sebab kegagalan BUMN dalam mengembalikan pinjaman pada akhirnya berpotensi membebani fiskal negara (Tirtosuharto, 2020).

Selain itu, preferensi politik Jokowi yang menempatkan infrastruktur sebagai prioritas sering kali dipandang mengorbankan sektor lain yang tidak kalah penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Dari perspektif teori *human capital*, alokasi sumber daya yang lebih besar pada pembangunan sumber daya manusia seharusnya dapat menciptakan basis pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dibandingkan investasi fisik semata (Becker, 1993). Dengan demikian, kebijakan Jokowi mengandung trade-off antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia.

Kebijakan pembangunan infrastruktur pada era Joko Widodo tidak semata-mata dapat dipahami dalam kerangka ekonomi, tetapi juga dalam logika politik yang pragmatis. Pragmatisme politik Jokowi tercermin dari pilihan kebijakan yang menekankan pada capaian-capaian yang bersifat kasat mata (*tangible*) dan cepat dirasakan oleh masyarakat luas. Infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, hingga ikon besar seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung dan Ibu Kota Nusantara, menjadi instrumen politik untuk menunjukkan keberhasilan pemerintahan dalam jangka pendek sekaligus membangun narasi modernisasi negara (Hadiz, 2017).

Secara politis, fokus pada infrastruktur berfungsi sebagai strategi legitimasi. Pertama, pembangunan fisik yang masif menciptakan citra Jokowi sebagai *developmental state leader* yang bekerja nyata (*the working president*), sehingga memperkuat dukungan elektoral dan mengurangi delegitimasi oposisi. Kedua, infrastruktur dijadikan simbol pemerataan pembangunan, yang secara efektif meredam potensi resistensi daerah non-Jawa terhadap dominasi pusat. Hal ini berkontribusi pada stabilitas politik dengan menyalurkan aspirasi pembangunan ke wilayah pinggiran yang selama ini terpinggirkan dalam struktur ekonomi nasional.

Ketiga, pembangunan infrastruktur juga memperkuat basis koalisi politik Jokowi. Proyek-proyek besar yang bernilai triliunan rupiah memberi ruang distribusi sumber daya kepada aktor-aktor politik, BUMN, dan pengusaha swasta yang menjadi bagian dari aliansi kekuasaan. Dengan demikian, infrastruktur tidak hanya berfungsi

sebagai alat pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai *patronage resources* yang memperkuat hegemoni politik Jokowi.

Namun, pragmatisme ini juga menimbulkan paradoks. Di satu sisi, ia memperkuat legitimasi politik Jokowi melalui keberhasilan pembangunan yang terlihat dan dapat dikapitalisasi secara elektoral. Di sisi lain, ketergantungan pada utang dan eksploitasi BUMN karya menimbulkan beban fiskal jangka panjang, yang berpotensi melemahkan stabilitas ekonomi-politik jika pertumbuhan tidak mampu menyeimbangkan peningkatan liabilitas negara. Dengan kata lain, pragmatisme Jokowi dalam kebijakan infrastruktur berhasil mengonsolidasikan kekuasaan pada masa pemerintahannya, tetapi meninggalkan tantangan serius bagi rezim pasca-Jokowi

2.7 Politik Hukum Era Jokowi

Salah satu ciri utama dari praktik pragmatisme politik Joko Widodo dalam konteks pembangunan infrastruktur adalah penggunaan rekayasa regulasi sebagai instrumen untuk melancarkan ambisi pembangunan. Jokowi menempatkan hukum bukan sekadar sebagai norma yang bersifat mengikat, melainkan sebagai perangkat politik yang dapat diubah sesuai kebutuhan untuk mempercepat realisasi program prioritasnya. Dalam kerangka Machiavellian, langkah ini mencerminkan pandangan bahwa hukum hanyalah sarana untuk menopang kekuasaan, bukan tujuan itu sendiri.

Perubahan regulasi terlihat jelas dalam sejumlah undang-undang strategis. Undang-Undang Cipta Kerja (2020, revisi 2023) merupakan contoh paling menonjol, yang menyederhanakan perizinan, mempermudah pengadaan lahan, serta membuka ruang lebih luas bagi investasi dalam proyek infrastruktur. Di samping itu, revisi UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum mempercepat proses pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional, meskipun di sisi lain memicu konflik agraria yang cukup luas.

Selain itu, UU Minerba 2020 dan UU Ibu Kota Negara (2022) memperlihatkan bagaimana regulasi diformulasikan untuk mendukung agenda infrastruktur dan industrialisasi. UU Minerba menjamin pasokan sumber daya bagi proyek energi dan kawasan industri, sedangkan UU IKN memberi legitimasi hukum sekaligus insentif

fiskal besar bagi investor dalam pembangunan ibu kota baru. Bahkan, melalui Perppu No. 1/2020 yang kemudian menjadi UU No. 2/2020, Jokowi melonggarkan aturan defisit APBN di atas 3% dari PDB, sehingga membuka ruang fiskal yang lebih luas untuk mendanai proyek infrastruktur meski harus menambah utang negara.

Pragmatisme ini memiliki dua implikasi penting. Pertama, ia mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur dan memperkuat legitimasi politik Jokowi dengan menampilkan hasil pembangunan yang konkret dan kasat mata. Kedua, ia memperlihatkan pola politik hukum di mana regulasi diproduksi secara top-down untuk kepentingan kekuasaan, sering kali dengan mengabaikan aspek partisipasi publik maupun dampak jangka panjang terhadap keadilan sosial dan lingkungan.

Dengan demikian, rekayasa regulasi dalam era Jokowi dapat dipahami sebagai bentuk pragmatisme politik-infrastruktur, di mana hukum dijadikan instrumen fleksibel untuk menunjang kepentingan pembangunan sekaligus memperkuat hegemoni kekuasaan. Langkah ini berhasil menciptakan stabilitas politik dalam jangka pendek, tetapi juga menimbulkan paradoks berupa pelemahan prinsip demokrasi substantif dan potensi beban ekonomi yang diwariskan pada masa depan.

Meskipun secara formal perubahan undang-undang merupakan kewenangan bersama Presiden dan DPR, dinamika politik di era Joko Widodo menunjukkan keterlibatan eksekutif yang dominan dalam mengarahkan substansi regulasi. Banyak regulasi strategis yang terkait dengan infrastruktur lahir dari inisiatif pemerintah, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Negara, yang masuk ke dalam agenda legislasi nasional atas usulan eksekutif. Bahkan, Jokowi menggunakan instrumen Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), seperti Perppu No. 1/2020 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 2/2020, untuk membuka ruang fiskal lebih luas bagi pembiayaan pembangunan. Kekuatan koalisi mayoritas di DPR turut memperkuat posisi presiden sehingga proses legislasi lebih sering mencerminkan kehendak pemerintah ketimbang hasil deliberasi yang seimbang.

Dalam konteks ini, keterlibatan Jokowi dalam perubahan undang-undang dapat dipahami sebagai wujud pragmatisme politik, di mana hukum tidak diposisikan sebagai instrumen normatif yang rigid, tetapi sebagai sarana fleksibel untuk melancarkan

agenda prioritas pembangunan. Strategi ini memungkinkan percepatan proyek infrastruktur strategis nasional, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah melalui capaian pembangunan yang kasat mata. Namun, pendekatan pragmatis ini juga membawa implikasi serius, terutama terkait terpinggirkannya partisipasi publik dan meningkatnya risiko konflik sosial, sebagaimana tampak pada kontroversi pengadaan lahan dan resistensi terhadap Omnibus Law. Dengan demikian, keterlibatan Jokowi dalam rekayasa regulasi lebih mencerminkan orientasi pada efektivitas hasil ketimbang kepatuhan penuh pada prinsip deliberasi demokratis.

2.8 Politik Totalitarian Jokowi

Fenomena politik Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo sering dikategorikan sebagai bentuk *authoritarian turn*, yakni kecenderungan kembalinya praktik-praktik otoritarian di tengah kerangka formal demokrasi (Power, 2018). Meskipun Indonesia pasca-Reformasi kerap dipandang sebagai salah satu negara dengan konsolidasi demokrasi yang cukup maju di Asia Tenggara, dinamika politik di era Jokowi menunjukkan adanya pelemahan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan penguatan pola kekuasaan hegemonik.

Hegemoni kekuasaan pada masa pemerintahan Joko Widodo tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan otoritarianisme yang menguat dalam lanskap politik Indonesia pasca-Reformasi (Kimura, 2024). Sebagaimana strategi konsolidasi kekuasaan yang dijalankan Jokowi, alih-alih memperkuat oposisi sebagai pilar demokrasi, Jokowi merangkul hampir seluruh kekuatan politik besar ke dalam koalisi pemerintahan, termasuk lawan politiknya pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto. Praktik ini memang meneguhkan stabilitas pemerintahan, tetapi pada saat yang sama mengikis mekanisme check and balance yang esensial bagi demokrasi. Ketiadaan oposisi yang kuat mendorong terjadinya sentralisasi kekuasaan di lingkaran eksekutif dan memperbesar potensi otoritarianisme elektoral.

Selain itu, pemerintahan Jokowi juga menampilkan penggunaan instrumen negara untuk mengendalikan ruang publik. Penegakan hukum sering kali dipraktikkan secara selektif dengan mengkriminalisasi aktivis atau kelompok oposisi, sementara

kebebasan berekspresi di ruang digital diawasi ketat melalui regulasi kontroversial seperti UU ITE. Media arus utama pun kerap dibatasi secara tidak langsung melalui tekanan ekonomi-politik dan regulasi, sehingga mempersempit ruang kritik.

2.8.1 Kontrol Ruang Publik di Era Jokowi

Salah satu ciri menonjol dari *authoritarian turn* di bawah pemerintahan Jokowi adalah bagaimana negara menggunakan instrumen hukum, regulasi, serta institusi birokratis untuk mengendalikan ruang publik. Pola ini menunjukkan pergeseran dari otoritarianisme klasik yang identik dengan represi brutal, menuju otoritarianisme kontemporer yang lebih subtil dan berbasis legalitas formal.

Pertama, penegakan hukum selektif menjadi praktik yang semakin nyata. Sejumlah aktivis, akademisi, dan tokoh oposisi menghadapi kriminalisasi dengan dalih pelanggaran hukum, meski sebenarnya bermuatan politik. Instrumen seperti pasal makar, pasal penghinaan terhadap presiden, maupun pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering digunakan untuk membungkam kritik. Misalnya, aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah di media sosial dapat dengan mudah diproses hukum atas tuduhan penyebaran ujaran kebencian atau hoaks. Selektivitas ini menandakan bahwa hukum tidak berfungsi netral, melainkan sebagai alat kekuasaan.

Kedua, pengawasan ruang digital menjadi instrumen baru dalam mengendalikan oposisi. Melalui UU ITE dan berbagai regulasi turunannya, pemerintah memiliki kewenangan luas untuk memblokir konten, menutup akun, atau melakukan pemantauan terhadap aktivitas warganet. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi dibatasi bukan dengan kekerasan fisik, melainkan melalui ancaman hukum dan pengawasan digital yang menciptakan *chilling effect*. Hal ini sesuai dengan temuan jurnal bahwa rezim otoritarian kontemporer di Asia Tenggara menggunakan instrumen hukum dan teknologi informasi untuk menciptakan iklim ketakutan yang lebih tersembunyi namun efektif.

Ketiga, media arus utama menghadapi tekanan ekonomi-politik. Meskipun tidak ada pelarangan terang-terangan terhadap pemberitaan kritis, media sering berada di bawah tekanan melalui mekanisme perizinan, iklan pemerintah, atau kepemilikan

media yang terafiliasi dengan elit politik dan bisnis. Akibatnya, ruang kritik menyempit karena media cenderung melakukan *self-censorship* untuk menjaga keberlangsungan bisnis mereka. Kondisi ini menunjukkan bagaimana kontrol negara terhadap informasi dijalankan bukan semata-mata dengan sensor langsung, tetapi melalui mekanisme ekonomi-politik yang lebih halus.

2.8.2 Normalisasi Warisan Orde Baru dalam Politik Jokowi

Normalisasi warisan Orde Baru dalam politik kontemporer Indonesia tampak jelas dalam cara pemerintahan Joko Widodo mengelola kekuasaan. aktor-aktor politik dan institusi yang menjadi tulang punggung rezim Soeharto, seperti Golkar dan militer, tetap memiliki peran dominan pasca-Reformasi. Partai Golkar yang sejak lama menjadi mesin politik Orde Baru mampu bertahan melalui adaptasi dalam sistem pemilu demokratis, sementara kekuatan militer tetap menikmati tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Pola ini membuka jalan bagi normalisasi gagasan kepemimpinan kuat ala Orde Baru dalam politik masa kini. Jokowi memanfaatkan kecenderungan tersebut melalui strategi pragmatis: merangkul partai-partai besar dalam koalisi supermayoritarian, membuka ruang masuknya figur militer ke lingkaran kekuasaan, serta pada akhirnya menjalin aliansi dengan Prabowo Subianto—salah satu simbol paling nyata dari kontinuitas Orde Baru—hingga berhasil mengantarkannya menjadi presiden pada 2024 dengan dukungan Jokowi.

Salah satu aspek penting dalam pembahasan hegemoni kekuasaan politik di era Joko Widodo adalah kembalinya militer ke dalam ruang politik sipil melalui apa yang sering disebut sebagai repolitisasi militer. Pasca-Reformasi 1998, agenda utama demokratisasi adalah mengakhiri *dwifungsi ABRI* dan membatasi peran militer dalam politik. Namun, di era Jokowi, kecenderungan tersebut mulai bergeser.

Pertama, Jokowi memperluas peran teritorial TNI melalui penugasan Babinsa (Bintara Pembina Desa) untuk terlibat dalam program-program pembangunan desa dan sosialisasi kebijakan pemerintah. Langkah ini secara substansial mengembalikan fungsi sosial-politik militer seperti di era Orde Baru, ketika TNI digunakan sebagai instrumen kontrol sosial di tingkat akar rumput (Mietzner, 2018).

Kedua, terdapat penempatan perwira aktif maupun purnawirawan TNI di berbagai jabatan sipil dan birokrasi. Jokowi menunjuk sejumlah purnawirawan jenderal ke posisi strategis seperti Kepala BIN, Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, hingga Kepala Badan Pangan Nasional. Penempatan ini memperlihatkan pola kooptasi militer ke dalam struktur politik, yang bukan hanya sekadar teknokratis melainkan juga simbol kontinuitas pengaruh militer dalam pemerintahan sipil (Laksmiana, 2020).

2.8.3 Lingkaran Kekuasaan Famili Jokowi

Hegemoni kekuasaan pada masa pemerintahan Joko Widodo menunjukkan kecenderungan yang semakin melekat pada pola politik dinasti. Dalam perspektif Antonio Gramsci, hegemoni tidak hanya lahir dari dominasi koersif negara, tetapi juga melalui persetujuan sosial yang dibangun lewat normalisasi praktik kekuasaan (Gramsci, 1971). Dinamika ini tampak jelas pada cara Jokowi memperluas jaringan kekuasaannya melalui keluarga inti maupun kerabat dekat yang menduduki jabatan politik dan posisi strategis di badan usaha milik negara (BUMN). Proses ini merefleksikan pola yang menyerupai praktik totalitarianisme kultural, di mana kekuasaan tidak lagi sekadar dijalankan oleh institusi negara, tetapi juga dimonopoli dan dipersonalisasi melalui lingkaran keluarga.

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, merupakan contoh paling kentara dari ekspansi dinasti politik ini. Setelah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta (2021–2024), Gibran kemudian terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 mendampingi Prabowo Subianto. Kenaikan ini tidak lepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden, yang membuka jalan bagi Gibran meski belum berusia 40 tahun. Masalahnya, putusan tersebut dikeluarkan di bawah kepemimpinan Anwar Usman, adik ipar Jokowi, yang kemudian dijatuhi sanksi oleh Majelis Kehormatan MK karena terbukti melakukan pelanggaran etik serius (Kompas, 2023). Fenomena ini menimbulkan persepsi bahwa jalur hukum dan institusi yudikatif dipolitisasi demi melanggengkan agenda dinasti.

Selain Gibran, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, juga mendapat jalur instan dalam politik. Pada September 2023, Kaesang resmi diangkat sebagai Ketua

Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya beberapa hari setelah resmi menjadi anggota partai. Langkah ini dianggap anomali karena Kaesang sama sekali tidak memiliki rekam jejak politik, sehingga publik menilai pengangkatan tersebut lebih didasarkan pada statusnya sebagai anak presiden ketimbang kapasitas politik (BBC News Indonesia, 2023).

Dalam lingkup yang lebih luas, menantu Jokowi, Bobby Nasution, juga berhasil memperluas jejaring dinasti dengan menempati jabatan publik. Setelah memenangkan Pilkada Medan 2020 dan menjabat sebagai Wali Kota Medan, Bobby kembali melaju ke tingkat provinsi dengan terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 2024–2029. Kemenangan ini memperkuat persepsi publik bahwa keluarga Jokowi tidak sekadar ikut serta dalam politik elektoral, tetapi telah mendominasi ruang kompetisi politik dengan dukungan jaringan kekuasaan pusat (Detik, 2024).

Dominasi famili Jokowi tidak berhenti pada ranah politik elektoral. Sejumlah kerabat dekat juga memperoleh posisi strategis di BUMN, yang memperlihatkan praktik nepotisme terselubung dalam birokrasi ekonomi negara. Bagaskara Ikhlasulla Arif, keponakan Jokowi, diangkat sebagai Komisaris Independen PTPN IV sejak 2020. Sementara itu, Joko Priyambodo, keponakan lain, menduduki jabatan Komisaris Independen BRI Agro, dan Sigit Widyawan, adik ipar Jokowi, diangkat sebagai Komisaris Independen PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Tempo, 2020). Posisi komisaris BUMN selama ini kerap dipandang sebagai "posisi politik" yang menjadi bagian dari bagi-bagi kekuasaan, sehingga keterlibatan keluarga Jokowi di dalamnya semakin menegaskan praktik nepotisme dalam distribusi jabatan publik.

Pola ini memperlihatkan bahwa hegemoni Jokowi memiliki karakteristik totalitarianisme elektoral dan birokratis, di mana instrumen negara, institusi hukum, serta badan usaha strategis digunakan untuk memperkuat legitimasi politik keluarga. Praktik ini juga mengingatkan pada warisan Orde Baru, ketika Soeharto menempatkan anak-anak serta kerabatnya dalam bisnis dan politik untuk menjaga cengkeraman kekuasaan (Hadiz & Robison, 2017). Dengan demikian, era Jokowi tidak hanya mengulang pola lama, tetapi juga mengadaptasinya dalam konteks demokrasi elektoral

kontemporer, menjadikan demokrasi Indonesia semakin terkikis oleh dominasi oligarki dan politik dinasti.

2.8.4 Patron-Klien dalam Lingkaran Geng Solo`

Dalam dinamika pemerintahan Jokowi, penempatan individu-individu kepercayaan pada posisi strategis dapat dipahami sebagai upaya membangun mekanisme *proxy politics* dalam mempertahankan sekaligus memperluas hegemoni kekuasaan. Istilah “Geng Solo” merujuk pada lingkaran orang-orang dekat Joko Widodo (Jokowi) yang berasal dari Surakarta (Solo), tempat asal dan karier politik awal Jokowi sebelum menjadi presiden. Istilah ini digunakan oleh para pengamat politik dan media untuk menggambarkan jejaring kekuasaan informal yang terbentuk sejak masa Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta (2005–2012), kemudian terbawa hingga ke tingkat nasional. Selain jejaring yang berasal dari Solo, istilah “Geng Solo” juga dapat merujuk pada orang-orang terdekak yang ada pada lingkaran politik Jokowi.

Hubungan diantara aktor-aktor “Geng Solo” bersifat personal dan patron-klien, Jokowi berperan sebagai patron (pemberi perlindungan dan akses kekuasaan) sedangkan para loyalisnya menjadi klien yang membalas dengan loyalitas politik dan administratif. Sebagai patron sentral, Jokowi adalah sumber utama legitimasi politik, akses kekuasaan, dan distribusi sumber daya. Jokowi menjadi pusat gravitasi dalam jaringan *Geng Solo* yang membentuk relasi yang mengedepankan loyalitas personal dan asal-usul sosial lebih dominan dibanding ideologi atau institusi partai. Jokowi memanfaatkan kedekatan sosial dan loyalitas personal untuk membentuk struktur kekuasaan informal yang menopang stabilitas politiknya di tingkat nasional. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Edward Aspinall dan Ward Berenschot (2019) dalam *Democracy for Sale*, bahwa politik Indonesia pasca-Reformasi ditandai oleh praktik klientelisme di mana hubungan personal dan pertukaran sumber daya menggantikan ideologi sebagai dasar pengorganisasian kekuasaan.

Berikut merupakan aktor-aktor yang berfungsi sebagai “broker kekuasaan”, menghubungkan Jokowi dengan berbagai klien di bidang ekonomi, militer, dan politik.

Tabel 2.1 *Broker* Kekuasaan Jokowi

Aktor	Peran dan Fungsi dalam Jaringan Patronase
Luhut Binsar Pandjaitan	Mentor politik dan penasihat utama Jokowi; mengelola jaringan bisnis, investasi, dan hubungan internasional. Berperan sebagai patron sekunder yang menyalurkan akses ekonomi dan politik.
Erick Thohir	Menteri BUMN dan pengelola jaringan ekonomi-politik Jokowi; menghubungkan elite bisnis dengan kekuasaan eksekutif.
Budi Gunawan (BG)	Kepala BIN, mengamankan stabilitas politik dan mengelola intelijen untuk kepentingan pemerintahan Jokowi.
Hadi Tjahjanto	Mantan Panglima TNI dan Menko Polhukam; asal Surakarta; loyalis yang memperkuat kontrol militer-birokrasi.
Moeldoko	Kepala Staf Presiden; menjadi jembatan antara istana dan jaringan partai serta militer.
Rini Soemarno	Loyalis lama yang mengelola BUMN di periode awal pemerintahan Jokowi, membuka jalur patronase ekonomi.
Ari Dwipayana	Koordinator Staf Khusus Presiden; mengatur komunikasi politik dan ideologisasi narasi kekuasaan Jokowi.
Tito Karnavian	Mantan Kepala Densus 88 dan rekan Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo. Tito dikenal dekat dengan Jokowi sejak penanganan bom Solo dan sering disebut sebagai “orangnya Jokowi” di tubuh Polri.
Listyo Sigit Prabowo	Mantan ajudan Jokowi ketika menjabat Presiden, merupakan contoh konkret hubungan patron–klien yang eksplisit. Pengangkatannya sebagai Kapolri menandai dominasi penuh Jokowi dalam menentukan arah Polri.

Relasi patron–klien dalam jaringan *Geng Solo* mencerminkan salah satu manifestasi politik patrimonial di Indonesia yang bertransformasi dalam konteks demokrasi elektoral. Sebagai figur patron utama, Joko Widodo (Jokowi) membangun basis kekuasaannya melalui jaringan personal yang berakar dari Solo, kota tempat karier politiknya dimulai. Jokowi memanfaatkan kedekatan sosial dan loyalitas personal untuk membentuk struktur kekuasaan informal yang menopang stabilitas politiknya di tingkat nasional.

Salah satu patron sekunder paling berpengaruh dalam jaringan ini adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Meskipun bukan berasal dari Solo, Luhut memainkan peran kunci sebagai perantara antara istana dan jaringan oligarki ekonomi. Ia menyediakan akses terhadap investasi, proyek infrastruktur, serta hubungan diplomatik yang memperkuat legitimasi politik Jokowi. Menurut Vedi Hadiz (2017), hubungan semacam ini mencerminkan “reformasi oligarki,” di mana kekuasaan ekonomi tetap mendominasi politik, namun kini beroperasi melalui figur populis seperti Jokowi. Luhut menjadi figur patron sekunder yang mengelola jaringan ekonomi, birokrasi, dan militer untuk mendukung patron utama dalam menjaga stabilitas rezim.

Dalam lingkaran birokrasi dan keamanan, Budi Gunawan (Kepala BIN) dan Hadi Tjahjanto (mantan Panglima TNI) berperan sebagai klien strategis sekaligus pelindung politik. Keduanya memiliki kedekatan personal dengan Jokowi dan berfungsi menjaga keamanan politik pemerintahan. Marcus Mietzner (2020) dalam *Authoritarian Innovations in Indonesia under Jokowi* mencatat bahwa pemerintahan Jokowi memperlihatkan kecenderungan ke arah konsolidasi kekuasaan eksekutif melalui kontrol atas aparat keamanan. Dengan demikian, relasi patron–klien antara Jokowi, Budi Gunawan, dan Hadi Tjahjanto bersifat simbiotik: loyalitas dan stabilitas politik dibalas dengan kepercayaan dan akses terhadap posisi strategis.

Di tingkat politik lokal, figur seperti FX Hadi Rudyatmo, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep menegaskan dimensi “keluarga” dalam patronase politik Jokowi. FX Rudyatmo menjadi simbol loyalitas lama sejak Jokowi menjabat Wali Kota Surakarta, sementara Gibran dan Kaesang merupakan bentuk aktualisasi dinasti politik yang memperluas hegemoni kekuasaan keluarga hingga level nasional. Peneliti seperti

Eve Warburton (2021) dalam *Presidential Power in Indonesia* menunjukkan bahwa Jokowi menggunakan strategi patronase berbasis keluarga untuk memastikan kontinuitas politik pasca-masa jabatannya, menggabungkan model klientelisme lokal dengan strategi oligarki nasional.

Selain dimensi politik, jaringan *Geng Solo* juga beroperasi melalui ekonomi patronase. Erick Thohir dan Rini Soemarno menjadi contoh klien ekonomi yang memperoleh kepercayaan untuk mengelola BUMN dan proyek strategis nasional. Mereka berperan dalam mengonsolidasikan dukungan kelas bisnis dan investor domestik maupun asing, sementara loyalitas terhadap patron utama dijaga melalui mekanisme distribusi proyek dan jabatan. Relasi ini mengafirmasi analisis Richard Robison dan Vedi Hadiz (2004) dalam *Reorganising Power in Indonesia*, bahwa transformasi ekonomi pasca-Orde Baru tidak menghapus struktur patronase, melainkan menyesuaikannya dengan konteks demokrasi neoliberal.

2.8.4.1 Klien Ekonomi dalam Jaringan Patron–Klien Geng Solo

Dalam struktur patron–klien pemerintahan Joko Widodo, dimensi ekonomi memegang peranan kunci yang menopang stabilitas kekuasaan. Jokowi tidak hanya mengandalkan loyalitas politik, tetapi juga membangun jaringan ekonomi yang kuat melalui figur-figur kepercayaan yang berfungsi sebagai *broker* antara negara, pasar, dan kekuasaan. Erick Thohir, Rini Soemarno, dan sejumlah pengusaha nasional memainkan peran sebagai klien ekonomi yang memperoleh legitimasi dan sumber daya negara melalui kedekatan personal dengan patron utama. Mereka menjadi bagian dari strategi Jokowi untuk memadukan kekuatan negara dan kapital swasta guna memperluas basis kekuasaan politik dan memperkuat agenda pembangunan ekonomi. Dalam kerangka ini, seperti dijelaskan oleh Robison dan Hadiz (2004), hubungan antara negara dan kapital di Indonesia pasca-Orde Baru bersifat *oligarkis-klientelistik*, di mana kekuasaan ekonomi dan politik saling menopang melalui mekanisme pertukaran kepentingan.

Erick Thohir merupakan contoh paling mencolok dari klien ekonomi yang kemudian menjadi aktor penting dalam struktur pemerintahan Jokowi. Awalnya

dikenal sebagai pengusaha media dan olahraga, Erick memperoleh legitimasi politik setelah menjadi Ketua TKN Jokowi–Ma’ruf pada Pilpres 2019. Pengangkatannya sebagai Menteri BUMN menunjukkan bentuk kepercayaan yang didasarkan pada loyalitas personal, bukan semata kapabilitas teknokratis. Melalui posisinya, Erick mengelola portofolio strategis yang menjadi sumber patronase ekonomi besar—dari proyek infrastruktur hingga penunjukan direksi BUMN. Hal ini sesuai dengan temuan Aspinall dan Berenschot (2019), bahwa politik Indonesia modern tetap didominasi oleh pertukaran sumber daya ekonomi untuk memperoleh loyalitas politik. Dalam konteks ini, Erick berfungsi sebagai klien sekaligus *executor* kebijakan patron, mengamankan jaringan loyalis ekonomi yang mendukung rezim Jokowi.

Selain Erick, Rini Soemarno juga memainkan peran penting sebagai klien ekonomi pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Sebagai Menteri BUMN (2014–2019), Rini menjadi figur sentral dalam mengonsolidasikan proyek-proyek strategis nasional, terutama di sektor energi, logistik, dan infrastruktur. Ia dikenal sebagai loyalis lama yang memiliki hubungan personal dengan Jokowi sejak masa awal kepemimpinannya. Peran Rini memperlihatkan bagaimana birokrasi ekonomi berfungsi sebagai saluran distribusi patronase, di mana penguasaan atas BUMN digunakan untuk memperkuat kontrol politik. Praktik ini mencerminkan apa yang disebut Hadiz (2017) sebagai *state capture by oligarchic interests*, di mana negara menjadi instrumen bagi elite terdekat untuk memperluas sumber daya dan kekuasaan.

Klien ekonomi dalam jaringan Jokowi tidak hanya berasal dari lingkaran pemerintahan, tetapi juga melibatkan pengusaha nasional dan konglomerat yang memiliki kepentingan terhadap proyek infrastruktur. Melalui program ambisius seperti tol laut, *food estate*, dan ibu kota negara (IKN), pemerintah menciptakan arena distribusi patronase baru. Pengusaha yang dekat dengan istana memperoleh akses terhadap proyek dan konsesi strategis, sementara dukungan politik terhadap pemerintah dijaga melalui relasi timbal balik. Pola ini sesuai dengan analisis Törnquist (2020), bahwa pembangunan ekonomi di bawah Jokowi sarat dengan praktik *developmental clientelism*, yakni penggunaan proyek pembangunan sebagai alat untuk

mempertahankan koalisi kekuasaan. Dalam hal ini, proyek ekonomi bukan sekadar kebijakan publik, tetapi juga mekanisme politik.

Relasi patron–klien ekonomi juga bekerja melalui organisasi relawan dan jaringan bisnis yang mengelilingi Jokowi, seperti *Projo* dan *Relawan Pengusaha Muda Nasional*. Organisasi semacam ini sering menjadi penghubung antara elite bisnis dan negara, memperantarai distribusi proyek, investasi, dan akses birokratis. Jokowi menggunakan jaringan ini untuk memperkuat loyalitas non-partai dan menciptakan keseimbangan kekuasaan di luar dominasi PDI-P. Sebagaimana dijelaskan oleh Mietzner (2020), Jokowi memanfaatkan jaringan relawan dan bisnis sebagai bentuk “institusionalisasi informal” yang mengaburkan batas antara negara, pasar, dan politik. Dalam konteks ini, klien ekonomi tidak hanya berperan pasif, tetapi menjadi bagian integral dari struktur kekuasaan yang menjaga rezim tetap stabil dan produktif secara ekonomi.